



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kebijakan Islandia Dalam Menangani Krisis Finansial
2008-2011

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Hendri Kurniawan

2013330083

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kebijakan Islandia Dalam Menangani Krisis Finansial
2008-2011

Skripsi

Oleh

Hendri Kurniawan

2013330083

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hendri Kurniawan
Nomor Pokok : 2013330083
Judul : Kebijakan Islandia Dalam Menangani Krisis Finansial 2008-2011


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 24 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe, M.S

: 

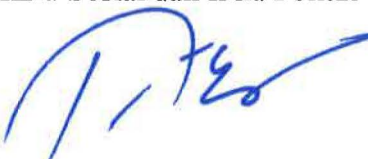
Sekretaris
Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

Anggota
Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hendri Kurniawan
NPM : 2013330083
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kebijakan Islandia Dalam Menangani Krisis
Finansial 2008-2011

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Agustus 2017



Hendri Kurniawan

ABSTRAK

Nama : Hendri Kurniawan
NPM : 2013330083
Judul : Kebijakan Islandia Dalam Menangani Krisis Finansial 2008-2011

Krisis finansial global mulai berdampak terhadap negara-negara di dunia pada tahun 2008. Ditandai dengan bangkrutnya perusahaan keuangan besar di Amerika Serikat yaitu Lehman Brothers pada bulan September 2008. Dengan adanya sistem integrasi pasar, perusahaan keuangan di dunia seolah saling terikat dan terhubung satu sama lain. Hal tersebut memicu penyebaran krisis finansial ke seluruh dunia. Islandia merupakan salah satu negara yang terkena imbasnya di akhir tahun 2008, ketika tiga bank terbesarnya dinyatakan bangkrut dengan total aset mencapai sembilan kali lipat dari produk domestik bruto negara Islandia. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang “Bagaimana kebijakan Islandia dalam menangani krisis finansial 2008-2011?”. Penelitian ini menggunakan teori Neo-Liberalisme, Manajemen Krisis, Interdependensi Kompleks dan konsep Ekonomi Makro.

Pemerintah Islandia mengambil langkah penting untuk menangani krisis dengan cara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal tersebut berupa reformasi terhadap sistem pajak, mengurangi pengeluaran negara dan membentuk program konsolidasi fiskal dengan IMF. Sementara kebijakan moneter melibatkan pengendalian modal, tingkat suku bunga dan menasionalisasi tiga bank terbesar di Islandia. Dalam penelitian ini, pemerintah Islandia berhasil mengubah kondisi perekonomian di Islandia menjadi lebih baik lewat kebijakan fiskal dan moneter.

Kata Kunci : Krisis finansial global, Islandia, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, IMF, kondisi perekonomian.

ABSTRACT

Name : Hendri Kurniawan
NPM : 2013330083
Title : *Iceland's Policy Undertaking Financial Crisis 2008-2011*

The global financial crisis started to affect countries all over the world since 2008. This begin with the bankruptcy of one of biggest financial company in the United States of America, the Lehman Brothers on September 2008. Through an integrated system in the market, financial companies in the world are connected, it triggers the spreading of financial crisis globally. Iceland was one of the countries who got the impact in the end of 2008, three of Iceland's biggest bank declared as bankrupt with total asset almost nine times from Gross Domestic Product of the country. And by that, this research is about to examine on "How Iceland's policy undertaking Global Financial Crisis 2008-2011?". This research uses the Neo-Liberalism, Management Crisis, Complex Interdependence theories and concept of Macro Economy.

Iceland's government took a crucial step to undertake crisis by using fiscal policy and monetary policy. The fiscal policy is a form of reforms to taxation systems, reducing the country's expenditure and create a consolidation fiscal program in collaboration with IMF. Meanwhile monetary policy involves controlling asset, interest rate and nationalizing three biggest banks in Iceland. In this research, Government of Iceland succeeded to change the economy to a better condition for Iceland through fiscal and monetary policies.

Keywords: Global financial crisis, Iceland, fiscal policy, monetary policy, IMF, economic situation.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang berjudul “Kebijakan Islandia Dalam Menangani Krisis Finansial 2008-2011”

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang perkuliahan Strata I dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D. selaku pembimbing skripsi, atas waktu dan kesabarannya dalam memberikan arahan selama berlangsungnya proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan para pembacanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Kedua orang tua saya yang sudah membiayai pendidikan dari Taman Kanak-Kanak hingga akhirnya berhasil menyelesaikan perkuliahan di UNPAR. Semoga kelak dapat membanggakan kedua orang tua saya.
- Mas Irawan yang menjadi dosen wali saya, juga atas ilmu yang banyak saya dapatkan selama belajar di KBI 2.
- Bang Atom selaku penguji saya. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya sehingga membantu penyempurnaan skripsi saya.
- Grup Barudaks kampus (Andrian, Wawa, Diko, Dion, Erlangga, Acung, Aji, Zico, Ajat, Jian, Rengga DLL) yang telah bersedia menjadi teman saya selama 4 tahun berkuliah di UNPAR.
- Gengsh (Hasan, Maria dan Hanna) yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Untuk maria, dimohon untuk segera menyelesaikan skripsinya dengan segera HAHA
- Kosan C92 (Anton, Ko adi, Ivan ganteng, Brian, kobin, dll) atas ketersediaannya dalam memberi segala bentuk bantuan terkait penyelesaian skripsi dan tugas lainnya
- Grup Dota 2 (Parto, Alvin, Adam, Andrian) yang selalu menemani saya ke warnet dengan paket malam andalannya. EZ MID!!
- Britsquad (Gisel, Monic, Erika, Tiara) atas waktu luangnya untuk kegiatan berleha-leha di Eatboss dan nonton-nonton ga jelas di Paskal 23.
- AMBIPUR (Gabriella, Jessica, Veronica dan Tamara) atas dukungan dan bantuan yang diberikan sehingga dapat mengumpulkan skripsi tepat pada waktunya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GRAFIK DAN TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.1 Metode Penelitian	22
1.6.2 Jenis Penelitian	23
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7 Sistematika Pembahasan	24
BAB II Krisis Finansial Global di Amerika Serikat	25
2.1 Penyebab krisis ekonomi 2008 di Amerika Serikat	25

2.1.1	Ekspansi Kredit yang dilakukan Bank Sentral Amerika (FED)	26
2.1.2	Pinjaman Sub Prima	28
2.1.3	Gelembung Perumahan	29
2.1.4	Terjadinya Kredit Macet	30
2.2	Dampak Krisis Finansial Secara Global	31
2.2.1	Produk Domestik Bruto saat Krisis Finansial	31
2.2.2	Jumlah Pengangguran saat Krisis Finansial	33
2.2.3	Aktivitas Perdagangan saat Krisis Finansial	34
2.2.4	Jumlah Aliran Investasi saat Krisis Finansial	36
2.3	Dampak Krisis Finansial di kawasan Eropa	38
2.3.1	Produk Domestik Bruto saat Krisis Finansial	38
2.3.2	Jumlah Pengangguran saat Krisis Finansial	39
2.3.3	Aktivitas Perdagangan saat Krisis Finansial	40
2.3.4	Jumlah Aliran Investasi saat Krisis Finansial	42
2.4	Krisis Utang di Eropa Sebagai Dampak dari Krisis Finansial	43
BAB III Krisis Finansial di Islandia		47
3.1	Keanggotaan Islandia dalam Organisasi Regional di Eropa	47
3.1.1	Keanggotaan Islandia dalam EFTA	48
3.1.2	Keanggotaan Islandia dalam EEA	49
3.2	Upaya Islandia Masuk ke dalam Integrasi Pasar Global	51
3.3	Kondisi Islandia sebelum Krisis Finansial	53
3.3.1	Produk Domestik Bruto sebelum Krisis Finansial	55
3.3.2	Jumlah Pengangguran sebelum Krisis Finansial	57
3.3.3	Aktivitas Perdagangan sebelum Krisis Finansial	58
3.3.4	Jumlah Aliran Investasi sebelum Krisis Finansial	60
3.4	Kondisi Islandia saat terkena Krisis Finansial	62
3.4.1	Produk Domestik Bruto saat Krisis Finansial	65
3.4.2	Jumlah Pengangguran saat Krisis Finansial	66
3.4.3	Aktivitas Perdagangan saat Krisis Finansial	67

3.4.4	Jumlah Aliran Investasi saat Krisis Finansial	68
BAB IV Kebijakan Fiskal dan Moneter Islandia sebagai Upayanya dalam Menangani Krisis Finansial		71
4.1	Kebijakan Fiskal.....	71
4.1.1	Perubahan Terhadap Sistem Pajak dan APBN Negara	71
4.1.2	Kerjasama dengan IMF terkait Perencanaan Penganggaran Dana	76
4.2	Kebijakan Moneter.....	84
4.2.1	Pengaturan terhadap Aliran Modal dan Tingkat Suku Bunga	85
4.2.2	Menasionalisasi Tiga Bank Terbesar di Islandia	91
4.3	Pencapaian Pemerintah Islandia di tahun 2011	96
BAB V KESIMPULAN		100
DAFTAR PUSTAKA		103

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Grafik 2.1: Tingkat Pertumbuhan PDB Dunia Tahun 1980-2016.....	32
Grafik 2.2: Volume Ekspor Barang dan Jasa Dunia Tahun 2000-2011.....	35
Grafik 2.3: Volume Impor Barang dan Jasa Dunia Tahun 2000-2011.....	36
Grafik 2.4: Pertumbuhan <i>FDI Inflows</i> Dunia Tahun 2005-2010 (dalam miliar).....	37
Grafik 2.5: Tingkat Pertumbuhan PDB di Eropa Tahun 2007-2011.....	39
Grafik 2.6: Tingkat Pengangguran di Eropa Tahun 2007-2011	40
Grafik 2.7: Pertumbuhan Perdagangan Barang EU-28 dalam Perdagangan Internasional Tahun 2006-2011 (Miliar Euro).....	41
Grafik 2.8: <i>FDI Outflows</i> Uni Eropa dan OECD Tahun 2005-2016 (dalam triliun).....	42
Grafik 3.1 : Tingkat Pertumbuhan PDB Islandia 2000-2007 (dalam miliar).....	56
Grafik 3.2 : Tingkat Pengangguran dan Upah Islandia tahun 2000-2007 (%)......	58
Grafik 3.3 : Pertumbuhan Ekspor-Impor Islandia Tahun 1995-2007 (dalam miliar).....	59
Grafik 3.4 : <i>FDI Outflows</i> Islandia Tahun 1990-2007 (dalam miliar).....	61
Grafik 3.5 : Tingkat Pertumbuhan PDB Islandia Tahun 2007-2012 (dalam miliar).....	65
Grafik 3.6 : Tingkat Pengangguran di Islandia Tahun 2007-2012.....	67
Grafik 3.7 : Pertumbuhan Ekspor-Impor Islandia 1995-2015 (dalam miliar).....	68

Grafik 3.8 : <i>FDI Outflows</i> Islandia Tahun 2008-2011 (dalam miliar).....	69
Tabel 2.1: Tingkat Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin di Beberapa Kawasan Dunia Tahun 2007-2009.....	34
Tabel 3.1: Islandia dalam Organisasi Internasional.....	52
Tabel 4.1 : Anggaran Dana Pemerintah Islandia di Berbagai Bidang 2009-2011...	74

DAFTAR SINGKATAN

AIG	: <i>American International Group</i>
APBN	: <i>Anggaran Pendapatan Belanja Negara</i>
ARM	: <i>Adjustable Rate Mortgages</i>
CDO	: <i>Collateralized Debt Obligation</i>
CIS	: <i>Commonwealth of Independent States</i>
EC	: <i>European Commission</i>
ECB	: <i>European Central Bank</i>
EEC	: <i>European Economic Community</i>
EEA	: <i>European Economic Area</i>
EFTA	: <i>Europe Free Trade Area</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FED	: <i>Federal Reserve System</i>
FME	: <i>Financial Supervisory Authority</i>
FRM	: <i>Fixed Rate Mortgages</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tarrifs and Trade</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INAO	: <i>Icelandic National Audit Office</i>
ISK	: <i>Icelandic Krona</i>
KPR	: <i>Kredit Pemilikan Rumah</i>
LIBOR	: <i>London Interbank Offered Rate</i>
MCI	: <i>Municipal Credit Iceland</i>
MFOC	: <i>Municipal Fiscal Oversight Committee</i>
MTEF	: <i>Medium Term Expenditure Framework</i>

MTFF	: <i>Medium Term Fiscal Framework</i>
NALA	: <i>National Association of Local Authorities</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
USD	: <i>United States Dollar</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekonomian merupakan aspek yang sangat vital bagi keberlangsungan suatu negara, karena hal tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan suatu negara. Maka, tidak heran pekonomian telah mengambil posisi penting dalam pembahasan internasional antar negara belakangan ini. Ekspor dan impor merupakan salah dua dari kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan negara saat ini. Semakin banyaknya perjanjian-perjanjian dagang yang dilakukan antar negara baik multilateral atau regional memicu keberadaan sistem perdagangan bebas.¹ Hal ini membuat batas-batas antar negara yang ada mulai berkurang sehingga kegiatan jual-beli barang antar negara dapat dilakukan dengan mudah, bahkan oleh negara yang jaraknya berjauhan sekalipun.

Aktivitas ini tidak terbatas hanya pada kegiatan jual beli barang, namun juga berupa aliran uang yang kerap kali diimplementasikan dalam bentuk saham ataupun tabungan yang memungkinkan seseorang atau badan keuangan memiliki uang di negara lain. Dengan begitu kondisi ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi aspek internal semata, namun juga dapat terpengaruh oleh aspek eksternal. Pengaruh ekonomi yang semakin meluas membuat arah pergerakan ekonomi itu sendiri

¹ Belay Seyoum , *Export-Import Theory, Practices, and Procedures*, 2nd ed (New York : The Haworth Press, 2009), 10-11.

menjadi sulit diprediksi, negara harus lebih berhati-hati dalam bertindak khususnya dalam melakukan kebijakan terkait ekonomi, karena ketika terjadi ketidakstabilan finansial di suatu negara, istilah “efek domino” memiliki persentase kemungkinan yang besar untuk terjadi.²

Krisis finansial merupakan suatu kondisi yang mengganggu aktivitas pasar keuangan dengan cara merusak kemampuan pasar untuk berfungsi secara efektif. Hal ini berpotensi memberi dampak buruk pada ekonomi riil suatu negara.³ Biasanya diikuti dengan situasi dimana para nasabah akan menarik tabungannya dari bank secara bersamaan, padahal bank mendapatkan dana utamanya dari tabungan nasabah yang nantinya dana tersebut akan diputar ke dalam bentuk pinjaman, saham, obligasi, dan lain-lain. Akibatnya, bank tidak lagi memiliki modal untuk diputar sehingga dalam jangka waktu tertentu bank tersebut akan mengalami kebangkrutan. Krisis disebabkan oleh beberapa hal salah satunya gelembung atau *bubble*, yaitu kondisi dimana harga barang akan semakin tinggi yang kemudian diikuti oleh kontraksi. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya harga barang secara drastis yang membuat perputaran roda ekonomi menjadi lesu. Terbentuknya peristiwa gelembung di pasaran menjadi sulit untuk diprediksi karena tidak adanya kesepakatan terhadap nilai fundamental suatu barang⁴. Krisis dapat menyebabkan resesi yang ditandai dengan

² The Economist, *The domino effect*, <http://www.economist.com/node/11667810>, diakses pada tanggal 16 Juli 2017

³ Yoichiro Ishihara (2005), *Quantitative Analysis of Crisis: Crisis Identification and Causality*, World Bank Policy Research, hal. 4.

⁴ Nasdaq, *Economic Bubble*, <http://www.nasdaq.com/investing/glossary/e/economic-bubble>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2016.

penurunan ekonomi setidaknya selama enam bulan. Diikuti oleh sejumlah indikator, seperti produk domestik bruto (PDB), pendapatan, pekerjaan, dan penjualan.⁵ Jika resesi terus terjadi selama beberapa tahun, maka hal tersebut berujung pada terjadinya depresi.

Krisis finansial global (*Great Recession*) terjadi bukan karena suatu peristiwa tunggal, melainkan berbagai runtutan peristiwa yang terjadi secara berkaitan. Krisis ini hampir menimpa negara-negara di seluruh dunia, baik negara besar maupun kecil. Sebenarnya krisis tersebut sudah mulai dirasakan saat bulan Agustus 2007, ketika salah satu bank terbesar asal Prancis BNP Paribas menyatakan pembekuan sekuritas terkait perumahan berisiko (*subprime mortgage*) dari Amerika Serikat.⁶ Bank-bank di Amerika Serikat seperti *Lehman Brothers* dan *American International Group* (AIG) mulai terkena imbasnya dan dinyatakan bangkrut di tahun 2008.⁷ Peristiwa ini juga mempengaruhi lembaga-lembaga keuangan di luar Amerika Serikat seperti di *United Kingdom* (Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara), Prancis, Belanda, Irlandia, Islandia, dan lain-lain.⁸

Selama masa krisis, PDB dunia mengalami penurunan. Pertumbuhan di tahun 2008 sebesar 1,819%, padahal di tahun sebelumnya mencapai 4,256%. Bahkan

⁵ The Balance (2017), *what is a recession? Examples, Impact, Benefits*, <https://www.thebalance.com/what-is-a-recession-3306019>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2016.

⁶ Bank Indonesia (2009), *Outlook Ekonomi Indonesia: Krisis Finansial Global dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia*, hal. 41.

⁷ The Balance (2017), *Top economic events in 2008 : How the world changed in 2008*, <https://www.thebalance.com/top-ten-economic-issues-in-2008-year-in-review-3305686>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

⁸ Departemen Keuangan (2008), *Tanya Jawab: Memahami Krisis Keuangan Global, Bagaimana Pemerintah Mengantisipasinya*, hal. 8.

pertumbuhan tersebut mencapai ke angka – 1,735% di tahun 2009.⁹ Aktivitas perdagangan dunia yang lesu membuat orang-orang kehilangan pekerjaannya, karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pendapatan rumah tangga berkurang yang mendorong terjadinya kemiskinan.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Islandia adalah negara republik dengan penduduk hanya berjumlah sekitar 330.000 jiwa dan merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari krisis finansial global.¹⁰ Padahal di tahun 2007, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menobatkan Islandia sebagai tempat terbaik untuk hidup.¹¹ Hal ini disebabkan kondisi negaranya yang makmur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Ekspor Islandia sangat bergantung pada hasil tangkapan laut dan mineral.

Proses liberalisasi ekonomi Islandia dimulai di awal tahun 1990-an, ketika sektor manufaktur, jasa, perangkat lunak komputer, dan pariwisata mulai difokuskan. Tahun 1994, Islandia mulai bergabung *European Economic Area* (EEA) yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negaranya. Contohnya adalah pergerakan bebas pasar modal yang mencakup jasa, barang, dan tenaga kerja yang terhubung

⁹ The World Bank, *GDP growth (annual%) 1961-2015*, <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

¹⁰ Central Intelligence Agency, *The World Fact Book, Europe: Iceland*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

¹¹ Ellert Jón Björnsson dan Kristinn Thor Valtýsson (2009), *Financial Crisis in Iceland: Icelandic Monetary Policy*, Aarhus School of Business, hal. 6.

dengan pasar Uni Eropa.¹² Di tahun 2003, merupakan era baru bagi perbankan Islandia, ketika selesainya proses privatisasi tiga bank milik negara, yakni Landsbanki, Glitnir, dan Kaupthing atas putusan Perdana Menteri D. Oddsson.¹³ Bank-bank Islandia semakin melebarkan upayanya dengan membuka cabang-cabang baru di negara-negara Eropa, seperti *United Kingdom*, Belanda, Luksemburg dan lain-lain, dimana meliputi proses pinjam-meminjam dana dari bank asing lainnya. Proses tersebut membuat pasar domestik semakin bergairah, transaksi keuangan terus berjalan tanpa henti yang akhirnya di tahun 2007 PDB menyentuh angka USD 21.294 miliar.¹⁴ Menjadikannya sebagai pencapaian terbesar sepanjang sejarah ekonomi Islandia. Hasilnya, total aset dari ketiga bank tersebut hampir mencapai sembilan kali lebih besar dibandingkan ekonomi Islandia di tahun 2007.

Dampak dari krisis finansial mulai terasa di Islandia di tahun 2008. Saat kredit macet yang terjadi di pasar global, mempengaruhi kegiatan pinjam-meminjam dana yang dilakukan bank-bank di Islandia, khususnya Kaupthing, Landsbanki, dan Glitnir. Pasalnya, bank-bank tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana jangka pendek dalam pasar keuangan.¹⁵ Ketiga bank tersebut dinyatakan bangkrut di awal Oktober 2008 dan segera di nasionalisasi oleh pemerintah Islandia.

¹² Piotr Ostaszewski (2013), *Iceland – Political Implications of The Financial Crisis of 2008 and The Road to Changes in The Economic Policy and in The Model of Democracy*, Forum Scientiae Oeconomia, Vol. 1 No.1, hal. 57.

¹³ Ibid, hal. 59.

¹⁴ The World Bank, *Iceland*, <http://data.worldbank.org/country/iceland>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

¹⁵ James K. Jackson (2008), *Iceland's Financial Crisis*, Congressional Research Service Prepared for Members and Committees of Congress, hal. CRS-3.

Kondisi negara Islandia jatuh ditandai dengan meningkatnya pengangguran dari 2,5% ke angka 7,1% hanya dalam waktu sekitar 5 bulan yaitu dari bulan September 2008 hingga Januari 2009. Nilai tukar Krona Islandia mengalami penurunan yang menyebabkan inflasi sebesar 11,6% pada Mei 2009¹⁶. Hampir menyebabkan semua bisnis di Islandia bangkrut. Mengingat total aset yang besarnya sembilan kali lipat dari PDB negara, membuat pemerintah Islandia tidak punya banyak cara selain membiarkannya bangkrut. Hal tersebut menyebabkan munculnya istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Islandia yakni “*too big to save*”.¹⁷

Walaupun merupakan suatu negara kecil dengan penduduk yang jumlahnya sedikit, namun Islandia mampu membuktikan kepada dunia bahwa mereka dapat memulihkan ekonominya dengan waktu yang relatif singkat. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Eropa, upaya yang dilakukan pemerintah Islandia dalam memulihkan ekonominya dapat dibilang lebih cepat. Dengan demikian upaya Islandia untuk keluar dari krisis tersebut dijuluki sebagai “*Economic Miracle*”¹⁸.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kebijakan Islandia dalam menangani kondisi ekonomi saat terkena dampak dari krisis finansial global dalam rentang waktu 2008-

¹⁶ Ellert Jón Björnsson dan Kristinn Thor Valtýsson, Loc,cit.

¹⁷ Elizabeth Matsangou (2015), Failing banks, winning economy : The truth about Iceland’s recovery, World Finance, <https://www.worldfinance.com/infrastructure-investment/government-policy/failing-banks-winning-economy-the-truth-about-icelands-recovery>, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.

¹⁸ Positive News (2013), *Iceland : an economic miracle?*, <https://www.positive.news/2013/economics/12895/iceland-economic-miracle/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.

2011. Periode waktu tersebut diambil karena pada tahun 2008, dampak krisis mulai masuk ke Islandia. Sementara, tahun 2011 diambil karena mulai dirasakannya pertumbuhan yang stabil pada perekonomian Islandia dalam hal penurunan jumlah pengangguran dan inflasi, serta peningkatan terhadap PDB per kapita.

Upaya-upaya yang dibahas lebih mengacu pada konsep makroekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara untuk memulihkan kondisi perekonomiannya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan resesi dan menurunkan jumlah pengangguran. Konsolidasi fiskal juga sebagai strategi yang digunakan pemerintah dalam mengatasi krisis. Konsolidasi fiskal adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi defisit pada pengeluaran pemerintah dan akumulasi utang. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam suatu negara, salah satunya dengan cara mengatur tingkat suku bunga dengan tujuan untuk mengatur laju inflasi, serta meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini mencoba menjawab “Bagaimana Kebijakan Islandia Dalam Menangani Krisis Finansial 2008-2011?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kebijakan Islandia dalam menangani perekonomiannya akibat dari krisis yang terjadi lewat serangkaian kebijakan ekonomi makro yang diambil, yaitu fiskal dan moneter.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Pertama adalah memberikan informasi kepada para akademisi lain terkait bagaimana suatu permasalahan di satu negara dapat menyebar ke negara lain. Kedua, menyediakan pengetahuan dasar untuk para akademisi lain yang nantinya akan melakukan penelitian lebih lanjut yang serupa. Dan ketiga, memberikan gambaran kepada akademisi lain mengenai kebijakan apa yang diambil Islandia terkait masalah krisis yang menimpa negaranya.

1.4 Kajian Literatur

Peneliti menggunakan beberapa literatur baik berupa buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul topik penelitian. Pertama, dalam buku berjudul “*Deep Freeze Icelands Economic Collapse*” yang ditulis oleh Philipp Bagus dan David Howden. Dalam bab 6 tentang “*a timeline of collapse*”,¹⁹ dapat dilihat bagaimana kegiatan pasar bebas yang dilakukan bank-bank komersil tersebut membuatnya jatuh ke dalam kebangkrutan. Kaupthing yang merupakan salah satu

¹⁹ Philipp Bagus dan David Howden, *Deep Freeze Icelands Economic Collapse* (Alabama : Ludwig von Mises Institute, 2011), 77-81.

bank terbesar di Islandia tidak mengurangi pasar sahamnya ketika terjadi krisis. Ketika keadaan semakin memburuk bank tersebut malah terus mengalirkan dananya untuk dipinjamkan. Akibatnya ketika salah satu bank terbesar bangkrut, maka hal tersebut berdampak pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Kenyataannya bank-bank di Islandia tidak memiliki aset jangka panjang, mereka hanya mendapatkan dana dan memutarnya lewat pinjaman jangka pendek. Ketika suatu kewajiban jangka pendek mulai sulit untuk dipenuhi, mereka kesulitan karena tidak memiliki cadangan dana untuk jangka panjang.

Kedua, dalam artikel yang ditulis oleh Throstur Olaf Sigurjonsonn dan Mar Wolfgang Mixa berjudul “ *Learning From the Worst Behaved : Iceland’s Financial Crisis and the Nordic Comparison*”,²⁰ melihat bagaimana Islandia terpengaruh krisis finansial global yang awalnya terjadi di Amerika. Ketika Islandia masuk dalam tahap *euforia* yang terus menciptakan ekspektasi akan kenaikan harga suatu barang. Islandia merasakan masalah dengan ekonominya tidak lama setelah kejatuhan ekonomi negara-negara tetangganya. Terdapat tiga level yang dapat dijelaskan, pertama, tingkat perusahaan. Dimana praktik bisnis di Islandia mendorong jatuhnya ekonomi negara. Kepemilikan dana di diluar negeri dan transaksi pinjam-meminjam antar lintas negara menimbulkan keruntuhan ekonomi negara yang akan menyebar ke negara lainnya. Kedua pada tingkat makro, ketika Bank Sentral Islandia menaikkan

²⁰ Throstur Olaf Sigurjonsonn dan Mar Wolfgang Mixa (2011), *Learning From the Worst Behaved : Iceland’s Financial Crisis and the Nordic Comparison*, Thunderbird International Business Review, Vol. 53 No. 2.

tingkat suku bunga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah meningkatkan pinjaman untuk pembelian rumah serta pajak yang rendah. Ketiga, tingkat kebijakan. Kebijakan deregulasi, seperti terlalu bebasnya arus aliran modal yang dilakukan institusi keuangan di Islandia merupakan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya krisis.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Prof. Piotr Ostaszewski berjudul “ *Iceland – Political Implications of The Financial Crisis of 2008 and The Road to Changes in The Economic Policy and in The Model of Democracy*”²¹ melihat bantuan yang ditawarkan oleh berbagai macam institusi serta hal apa sajakah yang memotivasi *International Monetary Fund* (IMF) sebagai dana moneter internasional sehingga bersedia menawarkan bantuannya kepada Islandia. Pertama, bertujuan untuk menghentikan depresiasi mata uang Islandia yaitu, Krona. Kedua, berfokus pada kebutuhan untuk merestrukturisasi sektor perbankan di Islandia, dimana diperlukannya suntikan modal secara langsung. Ketiga, untuk memastikan sistem keuangan yang berkelanjutan dalam rentang waktu menengah. Total dana bantuan yang didapat Islandia adalah sebesar USD 6 Miliar, dimana USD 2,1 miliar merupakan kontribusi dari IMF dan sisanya berasal dari Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Amerika dan negara-negara Skandinavia.

Posisi penelitian disini lebih mengarah kepada kebijakan yang dilakukan Islandia dalam memulihkan kondisi ekonominya akibat dari dampak krisis finansial

²¹ Piotr Ostaszewski, Op.cit, hal. 63-64.

global. Langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Islandia dan bantuan-bantuan dana talangan yang berasal dari institusi-institusi di dunia akan dijelaskan di dalam penelitian. Ketiga literatur yang sudah dijelaskan diatas akan digunakan juga sebagai referensi dalam penelitian ini karena didalamnya memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat membantu bagi proses penyusunan penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjelaskan bagaimana pemerintah Islandia mengambil kebijakan terkait krisis finansial global yang menimpa negaranya, terutama lewat kebijakan fiskal dan moneter.

1.5 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional merupakan ilmu yang luas, dimana ruang lingkup atau batasan ilmu tersebut masih belum ditentukan secara jelas. Namun, terdapat beberapa definisi mengenai ilmu tersebut, bagi beberapa pihak, ilmu ini memiliki definisi sebagai hubungan strategi diplomatik antar negara dimana didalamnya membahas isu-isu mengenai perang dan perdamaian, juga konflik dan kerjasama. Di pihak lain, ilmu ini diterjemahkan sebagai bentuk transaksi lintas batas, politik, ekonomi, sosial dan juga mempelajari negosiasi perdagangan atau operasi lembaga non-negara.²² Nyatanya, bidang studi akademis Ilmu Hubungan Internasional hampir tidak ada sebelum terjadinya Perang Dunia I, Ilmu Sosial mulai dibedakan saat abad ke-19, ketika munculnya ekonomi yang diduga sebagai bidang ilmiah studi Ekonomi

²² Chris Brown, *Understanding International Relations* (New York : St. Martin's Press,1997), 3.

Politik.²³ Ekonomi dan politik dalam lingkup hubungan internasional dilihat sebagai suatu yang terisolasi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama. Di awal 1970-an perbedaan tersebut mulai dipertanyakan oleh beberapa ahli, politik melahirkan negara-negara miskin dalam sistem internasional lewat sistem dekolonisasi yang dilakukan. Banyak negara-negara yang baru merdeka merasa tidak puas dengan posisinya dalam sistem ekonomi internasional. Hal inilah yang kemudian memunculkan suatu usulan yang bernama “*New International Economic Order*” di Perserikatan Bangsa Bangsa dengan maksud untuk memperbaiki sistem ekonomi negara-negara dunia ketiga dalam sistem internasional. Usulan tersebut memperlihatkan bagaimana posisi ekonomi suatu negara dalam tatanan internasional sangat berhubungan dengan sistem politik.²⁴

Aktivitas ekonomi mengalami perkembangan yang luar biasa karena didorong oleh salah satu teori ekonomi *Comparative Advantage* yang dikembangkan David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwa ketika terdapat dua negara yang memproduksi jenis produk yang sama, salah satu dari mereka pasti mempunyai keunggulan dalam memproduksi suatu produk dari pada negara lain. Hal ini menyebabkan perbandingan biaya dalam memproduksi produk-produk tertentu akan berbeda, intinya negara akan memiliki *Comparative Advantage* jika memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu jenis produk. Dengan demikian saat ini negara-negara cenderung melakukan

²³ Ibid, hal. 21.

²⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (New York : Oxford University Press Inc., 2010), 183.

spesialisasi produk tergantung kemampuannya masing-masing, sekaligus mendorong transaksi ekonomi antar negara lewat aktivitas ekspor-impor yang kemudian memunculkan integrasi ekonomi.²⁵ Di tahun 1960 – 1970 an, ketika volume transaksi perdagangan semakin besar, isu terkait ekonomi dalam agenda internasional seketika menjadi pembahasan yang umum. Ditandai dengan semakin berkurangnya batas-batas antar negara, kemudahan arus masuk bagi suatu barang ke negara lain, munculnya perusahaan multinasional, dan semakin banyaknya kerjasama-kerjasama ekonomi antar negara, baik bilateral, multilateral, maupun berupa asosiasi dagang dalam kawasan yang sama. Padahal sebelumnya upaya ekonomi untuk mengatur dan mengelola ekonomi dunia sulit diterima di abad yang lalu, tetapi saat ini isu tersebut menjadi bahasan utama dalam hubungan internasional.²⁶

Perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Neo-Liberalisme, yaitu suatu pendekatan yang muncul di awal 1990-an yang bertumpu pada bagaimana organisasi internasional dan aktor-aktor non-negara lainnya dapat mendorong terjadinya kerjasama internasional. Secara khusus Neo-Liberalisme memfokuskan tentang bagaimana pengaruh dari pemerintahan demokratis, opini publik, pendidikan, perdagangan bebas, perusahaan komersial, hukum internasional, organisasi internasional, diplomasi multilateral yang dapat meningkatkan taraf hidup di dalam dunia ini.²⁷ Dalam buku “*World Politics: Trend and Transformation*”, dijelaskan

²⁵Brown, Op.cit, hal. 152.

²⁶Ibid, hal. 145.

²⁷ Charles W. Kegley, JR. dan Eugene R. Wittko, *World Politics: Trend and Transformation* (New York : St. Martin’s Press, 2001), 39.

terdapat beberapa segi-segi²⁸ serta bagaimana cara pandang Neo-Liberalisme terhadapnya. Dalam segi “*key units*”, Neo Liberalisme melihat unit kunci dalam hubungan internasional berupa negara, aktor non-negara, dan aktor transnasional lainnya. Segi “*core concerns*”, fokus utamanya adalah membina hubungan kerjasama antar negara di bidang ekonomi, sosial, dan masalah-masalah ekologis. Segi “*major approach*”, pendekatannya adalah kompleks interdependensi dan rezim. Segi “*outlook on global prospects*”, Neo-Liberalisme berharap adanya kerjasama dan pembentukan komunitas global. Segi “*motives of actors*”, tujuan yang dingin dicapai adalah kepentingan global, keadilan, kedamaian, dan kemakmuran. Segi “*central concepts*”, Neo-Liberalisme memandang konsep pokoknya adalah hubungan transnasional, hukum, pasar bebas, hubungan saling ketergantungan, hak asasi manusia, dan gender. Dan terakhir dari segi “*prescriptions*”, berupa tindakan mengembangkan rezim-rezim, mempromosikan lembaga demokrasi dan internasional yang bertujuan untuk mengkoordinasi tanggapan bersama terhadap masalah-masalah global.

Complex Interdependence menekankan bahwa semakin kuat ikatan yang terjadi diantara aktor-aktor transnasional, hal itu akan menyebabkan mereka saling bergantung dan tindakan yang dilakukan akan semakin rentan terhadap yang lainnya.²⁹ Ketika suatu masalah terjadi dalam suatu negara, maka masalah tersebut dapat menyebar yang berdampak terhadap negara lainnya. Hal ini disebabkan adanya integrasi yang menyatukan mereka di dalam suatu sistem internasional. Terdapat 3

²⁸Ibid, hal, 46.

²⁹ Kegley dan Wittko, Op.cit, hal. 41.

karakteristik dalam *Complex Interdependence*³⁰, yaitu pertama “*Multiple Channels*”, dimana terdapat beberapa saluran yang menghubungkannya dengan masyarakat di seluruh dunia. Dalam sistem yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, hubungan formal bukan lagi menjadi prioritas utama sebagai sumber dalam menghubungkannya dengan masyarakat. Hubungan non-formal menjadi suatu hal baru dalam berinteraksi antar negara, tidak hanya hubungan antar pemerintah tetapi juga hubungan aktor-aktor non-negara. Bank dan perusahaan multinasional lainnya memiliki dampak yang besar, sama halnya seperti hubungan antar negara. Disamping tujuan utama mereka dalam mengejar keuntungan, mereka juga dapat membuat kebijakan di berbagai negara menjadi lebih sensitif satu dengan yang lainnya.³¹ Kedua, “*Absence of hierarchy among issues*”, dimana tidak ada lagi isu-isu yang pasti dalam pembahasan agenda internasional. Isu keamanan yang biasanya selalu menghiasi pembahasan antar negara, saat ini tidak secara terus menerus mendominasi agenda internasional. Ketiga, “*minor role of military force*”. Konsep *complex interdependence* berasumsi bahwa permasalahan ekonomi yang ada saat ini tidak lagi relevan jika harus diselesaikan dengan kekuatan militer. Situasi yang intens mungkin akan muncul, tetapi penggunaan militer sudah bukan lagi menjadi hal yang pantas dalam mencapai tujuan ekologis dan kesejahteraan ekonomi yang menjadi sangat penting saat ini.

³⁰ Keohane, R.O., & Nye, J. S, *Power and interdependence: World politics in transition*. Boston: Little Brown, 1977)

³¹ Ibid, hal. 26.

Krisis finansial yang dijelaskan dalam penelitian ini terjadi karena adanya ketergantungan yang kompleks antar negara. Sehingga krisis finansial tersebut dapat didefinisikan sebagai fenomena-fenomena seperti perubahan dalam volume kredit dan harga aset, serta gangguan parah diantara para aktor dan dalam kegiatan ekonomi lainnya.³² Terdapat 7 tahapan menurut Minsky³³ yang mendorong terjadinya krisis finansial, yakni *displacement*, *expansion*, *euforia*, *distress*, *revulsion*, *crisis* dan *contagion*.

Tahap awal yaitu *displacement* (pergeseran) adalah adanya perubahan permintaan dalam pasar yang mengakibatkan adanya ekspektasi dari para spekulan terhadap keuntungan di masa depan, aset-aset yang dimiliki investor nantinya akan mengalami ledakan atau *boom*. Kedua, *expansion* (perluasan) adalah adanya kesanggupan perusahaan dalam membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini diikuti dengan semakin banyaknya jumlah investor yang mengembangkan usahanya. Ketiga, *euforia* yaitu ketika ekspektasi terhadap peningkatan harga barang menjadi motif dibalik aktivitas belanjanya. Dengan tujuan akan menjual kembali barang tersebut ketika harganya terus meningkat. Keempat, *distress* (kesulitan) adalah kondisi pasar mulai lesu, ditandai dengan aktivitas pasar yang menurun dan likuiditas yang juga berkurang. Kelima, *revulsion* (perubahan) adalah ketika ekspektasi yang ingin dicapai mengalami perubahan yang tajam. Dalam

³² Stijn Claessens dan M. Ayhan Kose (2013), *Financial Crises: Explanations, Types, and Implications*, IMF, hal. 4-5.

³³ University of Puget Sound, *Financial Bubbles*, <http://www.pugetsound.edu/academics/departments-and-programs/undergraduate/ipe/resources/ipe-of-the-asian-crisis/financial-bubbles/>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

tahap ini para pelaku bisnis masih tetap melakukan penjualan padahal telah mengetahui informasi akan terjadinya perubahan di pasaran, disisi lain, para pembeli yang tidak mengetahui kondisi tersebut, terus melakukan aktivitas pembeliannya. Keenam, tahap *crisis* yakni penurunan harga suatu barang yang diperjual belikan di pasaran. Dan terakhir, *contagion* (penularan) adalah penyebaran krisis yang dialami suatu negara terhadap negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya efek dari hubungan saling ketergantungan yang ada antar pemerintah selaku aktor negara maupun aktor non-negara seperti perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam peristiwa yang terjadi pada Islandia, penularan krisis perbankan yang terjadi berubah menjadi krisis finansial. Dimana awalnya krisis yang terjadi dalam sektor perbankan dimulai ketika bank-bank melakukan kegiatan jual-beli surat-surat utang yang tidak berwujud. Namun, sebenarnya surat-surat utang tersebut didalamnya mengandung jumlah uang yang besar. Saat kredit macet terjadi, berdampak langsung terhadap kelangsungan bank-bank yang mayoritas menjalankan surat utang tersebut. Hasilnya, bank-bank mengalami kejatuhan dan tidak sanggup lagi membiayai dana perusahaannya. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh bank itu sendiri, tetapi juga negara dimana bank tersebut beroperasi.

Selain itu, Teori Konsumsi Keynes menyatakan bahwa meningkatnya suatu pendapatan individu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi individu lainnya, dan sebaliknya jika terjadi penurunan konsumsi hal tersebut berdampak pada

jatuhnya tingkat konsumsi dan pendapatan.³⁴ Seperti yang terjadi pada sektor perbankan di Eropa. Ketika terjadi kredit macet di Amerika, artinya tingkat konsumsi dalam konteks pembahasan ini yaitu surat utang mengalami penurunan. Sehingga pendapatan bank-bank lain juga mengalami penurunan. Mengingat perbankan di Islandia melakukan kegiatan jual beli surat utang dalam jumlah yang besar, maka saat tingkat pembelian surat utang di Eropa menurun akan berdampak pada tingkat konsumsi dan pendapatan bank-bank di Islandia. Akibatnya bank tidak lagi dapat menjalankan kegiatannya. Negara jatuh pada krisis finansial karena sektor perbankan memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan perputaran roda perekonomian di Islandia.

Dan terakhir adalah teori krisis yang dikemukakan oleh Minsky, dimana didalamnya terdapat salah satu siklus krisis yang dinamakan *Ponzy Finance*.³⁵ *Ponzy Finance* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ketika bank-bank investasi khususnya di Amerika Serikat melakukan kegiatan KPR yang kemudian digabungkan menjadi skema *Collateralized Debt Obligation*. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, pihak-pihak didalamnya rela mengambil resiko besar dengan meminjamkan uangnya kepada pihak yang dianggap tidak layak mendapat pinjaman. Ketika orang-orang tersebut tidak mampu membayar utangnya, maka proses penyitaan terjadi secara besar-besaran. Akibatnya, rumah-rumah banyak yang kosong sehingga

³⁴ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, interest, and Money*, <http://cas2.umkc.edu/economics/people/facultypages/kregel/courses/econ645/winter2011/generaltheory.pdf>, hal. 62-63.

³⁵ Martin H. Wolfson (2002), *Minsky's Theory of Financial Crisis in a Global Context*, *Journal of Economic Issues*, Vol. XXXVI No. 2, hal 394.

menimbulkan kejatuhan terhadap harga rumah yang juga secara terus menerus mengakibatkan penurunan terhadap nilai surat utang yang diperjual-belikan. Hal tersebut mengakibatkan kredit macet yang berdampak pada bangkrutnya bank-bank yang terlibat dalam produk investasi tersebut.

Dalam menghadapi krisis, negara membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi agar pengaruh dari krisis tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Konsep ekonomi makro dianggap lebih cocok karena lebih memfokuskan pada pembahasan aspek dan gejala ekonomi secara menyeluruh. Sebagai contoh dari ekonomi makro adalah pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran.³⁶ Indikator penting dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dihitung lewat Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto didefinisikan sebagai jumlah pengakumulasian antara pengeluaran masyarakat, investasi, total pengeluaran negara, dan total ekspor negara dikurangi dengan total impor negara.³⁷

Menurut *Cambridge Dictionary*³⁸, kebijakan didefinisikan seperangkat ide atau rencana yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, dimana ide atau rencana tersebut telah secara resmi disetujui oleh sekelompok orang, organisasi bisnis, pemerintah, atau sebuah partai politik. Terdapat dua kebijakan yang digunakan

³⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007), *Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, hal. 8.

³⁷ Boundless, *GDP Equation in Depth (C+I+G+X)*, <https://www.boundless.com/economics/textbooks/boundless-economics-textbook/measuring-output-and-income-19/measuring-output-using-gdp-92/gdp-equation-in-depth-c-i-g-x-349-12446/>, diakses pada 12 Oktober 2016.

³⁸ Cambridge Dictionary, Meaning of "Policy", <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/policy>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

pemerintah dalam mengatur ekonomi makro suatu negara, yakni kebijakan fiskal dan moneter.

Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.³⁹ Pengaturan dalam pendapatan negara, pengeluaran negara dan sistem perpajakan merupakan bagian dari langkah kebijakan fiskal. Pendapatan negara salah satunya berasal dari sektor pajak. Sementara, belanja negara digunakan untuk membiayai pegawai, subsidi, dan lain-lain. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah memulihkan resesi, menurunkan jumlah pengangguran, dan inflasi.⁴⁰

Konsolidasi fiskal sebagai strategi mengatasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah. Konsolidasi fiskal adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi defisit pada pengeluaran pemerintah dan akumulasi utang.⁴¹ Ketika terjadi krisis, umumnya negara berhati-hati dalam menggunakan anggarannya. Defisit yang terjadi dapat dikurangi dengan meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengurangi pengeluaran yang ada. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat mencapai keseimbangan dalam neraca perdagangan suatu negara.

Kebijakan moneter, melihat bahwa Bank Sentral merupakan aktor utama. Saat krisis terjadi, Bank Sentral berperan dalam menurunkan tingkat suku bunga dan

³⁹ Mark Horton dan Asmaa El-Ganainy (2009), *What is Fiscal Policy?*, Finance and Development, Vol. 46 No. 2, hal. 52.

⁴⁰ Open Stax (2016), *Principles Of Macroeconomics*, Rice University, hal. 398.

⁴¹ OECD (2011), *Fiscal Consolidation: targets, plans, and measures*, OECD Journal on Budgeting, Vol. 11/2, hal. 17.

menyediakan akses terhadap aktivitas kredit.⁴² Dalam konsep suku bunga, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka peredaran uang di pasaran semakin langka, dan sebaliknya.⁴³ Kebijakan ini lebih mengarah kepada upaya untuk mengontrol jumlah uang yang ada dengan maksud menjaga kestabilan harga, pertumbuhan bisnis serta berbagai jenis pengeluaran lainnya yang dapat mendukung terciptanya lapangan pekerjaan dan juga pertumbuhan PDB suatu negara.⁴⁴

Dan terakhir akan digunakan pendekatan manajemen krisis yakni langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghadapi krisis, baik saat sebelum krisis terjadi maupun saat sudah terjadi. Manajemen krisis mengarah kepada seperangkat kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh pihak yang berwenang guna membatasi pengaruh krisis dan berupaya untuk menghindari gangguan yang berpotensi mengganggu sistem finansial.⁴⁵ Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil dalam menangani krisis saat krisis tersebut terjadi.⁴⁶ Pertama, pemulihan. Pemulihan disini berkaitan dengan aktivitas pembukaan kembali bisnis -bisnis dan suntikan dana segar bagi pasar. Kedua, investigasi-investigasi yang dilakukan demi menyelidiki penyebab-penyebab krisis. Investigasi yang dilakukan bisa berupa pemeriksaan atau tuntutan terhadap badan-badan atau individu yang diduga menjadi penyebab krisis

⁴² Open Stax , Op.cit, hal. 343.

⁴³ Irving Fisher, *The Rate of Interest : Its Nature, Determination and Relation to Economic Phenomena* (New York : The Macmillan Company, 1907), 8.

⁴⁴ Perry Warjiyo Solikin (2003), *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, No. 6, hal. 2.

⁴⁵ European Communities (2001), *Report on Financial Crisis Management*, Economic and Financial Committee, hal. 9.

⁴⁶ Tony Jaques (2007), *Issue Management and Crisis Management: An Integrated , Non-linear, Relational Construct*, hal. 12-13.

terjadi yang akan diproses lewat hukum. Dan yang terakhir evaluasi, berupa analisa terhadap awal masalah, tinjauan terhadap proses-proses dan tindakan yang diambil. Dengan berbagai proses tersebut dapat diambil beberapa pelajaran agar masalah atau krisis dapat dicegah sehingga tidak terjadi kembali.

Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Neo-Liberalisme digunakan untuk mendeskripsikan bahwa tindakan kerjasama bukan hanya dilakukan oleh aktor negara, tetapi juga oleh aktor non-negara seperti perusahaan multinasional. Teori Interdependensi Kompleks digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu masalah yang terjadi dalam suatu kerjasama dapat menyebar dan berdampak terhadap pihak didalamnya. Teori Manajemen Krisis digunakan untuk mengevaluasi pencapaian Islandia serta faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomiannya sehingga dapat tumbuh dan pulih lebih cepat dibandingkan negara lainnya. Terakhir yaitu konsep Ekonomi Makro yang meliputi kebijakan fiskal dan moneter. Konsep tersebut menggambarkan kebijakan Islandia dalam menangani krisis finansial lewat kebijakan fiskal dan moneter.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi secara alami tanpa adanya upaya untuk memanipulasi situasi yang akan

diteliti.⁴⁷ Fokus dari pendekatan kualitatif adalah deskripsi terhadap permasalahan yang mengarah kepada penggunaan konsep, teori, atau evaluasi yang dilakukan lewat serangkaian proses yang dijalankan.⁴⁸ Pendekatan kualitatif membantu untuk memahami suatu permasalahan yang biasanya menggunakan kata-kata dari pada angka.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berjenis deskriptif, dimana menggambarkan atau mendeskripsikan kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah Islandia dalam menangani krisis finansial global 2008-2011.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data untuk penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari suatu badan kelompok dan individu tanpa melalui perantara sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung, yakni lewat perantara seperti media. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mempelajari data sekunder mengenai kasus Islandia saat terkena dampak dari krisis finansial global. Data yang ada seperti kebijakan Islandia dalam mengani krisis, kondisi perekonomian (tingkat ekspor dan impor, dan lain-lain) saat krisis terjadi diperoleh lewat buku, laporan, jurnal, berita, dan sumber internet.

⁴⁷ Beverley Hancock (1998), *An Introduction to Qualitative Research*, Trent Focus Group, hal. 2.

⁴⁸ Beverley Hancock, Elizabeth Ockleford, Kate Windridge (2009), *An Introduction to Qualitative Research*, National Institute for Health Research, hal. 6.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam hasil penelitian ini dibagi ke dalam lima bab.

Bab I memaparkan tentang latar belakang terjadinya suatu masalah, identifikasi masalah yang menjelaskan mengapa hal tersebut dapat menjadi masalah, pembatasan masalah yang menggambarkan topik apa yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang didalamnya menjelaskan teori yang tepat untuk digunakan dalam membahas penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II mendeskripsikan penyebab terjadinya krisis finansial global di Amerika Serikat, serta gambaran pertumbuhan PDB, jumlah pengangguran, aktivitas perdagangan, dan aliran investasi di Amerika Serikat, Dunia, dan kawasan Eropa saat terjadinya krisis.

Bab III menjelaskan keanggotaan Islandia dalam organisasi dunia dan kawasan, serta memberi gambaran mengenai pertumbuhan PDB, jumlah pengangguran, aktivitas perdagangan, dan aliran investasi di Islandia sebelum dan saat terjadinya krisis.

Bab IV membahas kebijakan apa saja yang diambil sebagai bentuk respon terhadap krisis yang terjadi lewat kebijakan fiskal, moneter, dan manajemen krisis.

Bab V menarik suatu kesimpulan yang berasal dari keseluruhan penjelasan penelitian yang sebelumnya telah dimuat ke dalam beberapa bab.